

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok telah terjalin sejak lama, yaitu pada tahun 1784 yang ditandai dengan dikirimnya kapal *Empress of China*.¹ Namun, hubungan ekonomi keduanya baru diresmikan pada tahun 1979, setelah kedua negara menormalisasi hubungan pasca perang saudara Tiongkok.² Hubungan ekonomi yang dijalin oleh kedua negara tidak selalu berjalan dengan baik. Amerika Serikat menganggap bahwa Tiongkok adalah salah satu rival terbesarnya dalam ekonomi global. Hal ini disebabkan Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, sehingga hubungan ekonomi antara kedua negara dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang begitu pesat menjadi ancaman bagi hegemoni ekonomi Amerika Serikat.³ Para konsumen asal Amerika Serikat mulai berkurang dan beralih menggunakan produk Tiongkok yang lebih terjangkau, sehingga menyebabkan produksi dalam negeri AS (Amerika Serikat) berkurang. Penurunan konsumen dalam negeri inilah yang akhirnya menyebabkan Amerika

¹ Office of The Historian, "A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: China," diakses 11 Februari 2025, <https://history.state.gov/countries/china#:~:text=On January 1%2C 1979%2C the,sole legitimate government of China.>

² Muchammad Akbar Kurniawan, Dinda Novita Sari, dan Nailul Fauziyah, "Tinjauan terhadap Kebijakan Ekonomi Tiongkok sebagai Pemuncak Global: Analisis Perbandingan dengan Amerika Serikat," *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 3, no. 1 (21 Januari 2024): 30–39, <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v3i1.6360>.

³ Yosias Marion dan Arthur Wabiser, "The SINO-US Relationship: Studi Kasus Kebijakan Amerika Serikat terhadap One China Policy," n.d.

Serikat mengeluarkan kebijakan proteksionis terhadap hubungan dagang dengan Tiongkok.

Pada tahun 2018, di masa kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat terlibat perang dagang dengan Tiongkok. Perang dagang ini dipicu oleh data neraca perdagangan internasional Amerika dan Tiongkok mengalami defisit yang mencapai US\$ 419,5 miliar.⁴ Sehingga Donald Trump menetapkan kebijakan proteksionis terhadap produk impor asal Tiongkok yang akhirnya menimbulkan perang dagang. Melalui perang dagang ini, Trump mendesak Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangan dan mengurangi defisit perdagangan yang dialami Amerika.⁵ Namun perang ini malah menyebabkan peningkatan biaya konsumen dan industri Amerika.

Pada tahun 2020, setelah dua tahun terlibat perang dagang, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengatasi perang dagang. Dalam kesepakatan tersebut, Tiongkok berjanji untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat untuk mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan transfer teknologi.⁶ Kesepakatan ini merupakan kemajuan positif bagi hubungan ekonomi kedua negara yang kian membaik, walaupun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Hubungan baik kedua negara tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda dunia pada saat itu. Pandemi ini menyebabkan

⁴ Muhammad Reza Ilham Taufani, "Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi," CNBC, 23 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230421165302-128-431640/membongkar-perang-dagang-as-vs-china-upaya-dedolarisasi>.

⁵ Guoyou Song, "China-US Economic and Trade Relations: Trump and Beyond," *East Asian Affairs* 02, no. 01 (Juni 2022), <https://doi.org/10.1142/s2737557922500012>.

⁶ Taufani, "Membongkar Perang Dagang AS Vs China & Upaya Dedolarisasi."

perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok menurun. Harga barang-barang produksi melonjak drastis sehingga menyebabkan inflasi. Amerika Serikat menyalahkan Tiongkok atas isu pandemi covid-19 yang mengakibatkan hubungan kedua negara kembali memburuk.⁷

Hubungan ekonomi yang telah lama dijalin oleh Amerika Serikat dan Tiongkok memburuk pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Perang dagang yang terjadi antara kedua negara menyebabkan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tegang. Meskipun perang dagang ini dimaksudkan untuk mendesak Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangannya, sehingga Amerika dapat mengatasi defisit perdagangan dan melindungi industri dalam negeri. Namun hal ini malah menyebabkan penurunan ekonomi dan mengakibatkan ketegangan hubungan ekonomi antara kedua negara yang juga berdampak pada perekonomian global.

Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat mempertahankan beberapa tarif masuk produk China yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan tarif yang dikenakan oleh Presiden Joe Biden hanya berfokus kepada industri tertentu, seperti teknologi.⁸ Kebijakan tarif yang dikeluarkan Biden dinilai lebih strategis karena berusaha untuk melindungi kaum menengah di Amerika Serikat. Kelanjutan kebijakan tarif impor ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika dan keunggulan ekonomi Amerika.

⁷ Taufani.

⁸ Patsy Widakuswara, "Perbedaan Biden dan Trump dalam Kebijakan Impor Produk asal China," VOA, 21 Mei 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/perbedaan-biden-dan-trump-dalam-kebijakan-impor-produk-asal-china/7619939.html>.

Pada tahun 2024, Presiden Joe Biden menetapkan kebijakan tarif masuk kendaraan listrik asal Tiongkok sebesar 100%.⁹ Tidak hanya itu, Presiden Biden juga meningkatkan pajak produk baja dan aluminium sebesar 25% dan produk semikonduktor sebesar 50%.¹⁰ Kebijakan ini dikeluarkan setelah Presiden Joe Biden meninjau kembali kebijakan tarif impor era Presiden Donald Trump. Hal ini merupakan upaya proteksionisme yang diambil Biden untuk melawan industri mobil listrik Tiongkok dan meningkatkan industri lokal.

Perbandingan kebijakan luar negeri antara Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok penting untuk dibahas karena dapat membantu dalam memahami dinamika hubungan ekonomi antara kedua negara. Kebijakan luar negeri Donald Trump lebih bersifat konfrontasi karena memulai perang dagang dengan Tiongkok. Sedangkan kebijakan luar negeri Joe Biden lebih berfokus kepada kerja sama ekonomi dan penguatan aliansi untuk mengatasi masalah ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok.¹¹ Walaupun melalui metode berbeda, kebijakan luar negeri kedua pemimpin bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian mengenai kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap Tiongkok, sebagian besar penelitian hanya berfokus kepada kebijakan luar negeri salah satu pemimpin, tanpa benar-benar membandingkan kebijakan luar negeri Trump dan Biden. Maka dari itu, penelitian ini berkontribusi untuk menambah wawasan mengenai kebijakan luar negeri

⁹ Widakuswara.

¹⁰ Widakuswara.

¹¹ Song, "China-US Economic and Trade Relations: Trump and Beyond."

Amerika Serikat kedepannya dengan memahami persamaan dan perbedaan dalam kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden.

Adanya perbedaan dan persamaan dalam kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Persamaan dan perbedaan dalam perumusan kebijakan luar negeri dari kedua presiden menjadi hal yang menarik untuk dianalisis. Dengan memahami bagaimana faktor internal dan eksternal dapat menentukan metode yang diterapkan dalam kebijakan luar negeri.

Peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok karena ingin memahami dinamika hubungan ekonomi Amerika-Tiongkok di masa kepemimpinan Trump dan Biden. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah kebijakan luar negeri kedepannya. Adanya persamaan dan perbedaan dari faktor-faktor tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negeri Amerika. Selain itu, perbandingan kebijakan luar negeri ini juga dapat digunakan untuk memahami dinamika perdagangan dan investasi antara Amerika dan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan luar negeri antara Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok memiliki metode yang berbeda. Kebijakan Trump lebih bersifat konfrontasi dengan memicu terjadinya perang dagang dengan

Tiongkok melalui penetapan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri. Sedangkan kebijakan Biden lebih mengutamakan kerja sama dan penguatan aliansi, namun tetap menerapkan beberapa tarif impor terhadap produk asal Tiongkok. Selain itu, dengan adanya penguatan aliansi, Biden berusaha untuk mengurangi ketergantungan Amerika terhadap produk impor asal Tiongkok. Walaupun memiliki metode yang berbeda, kebijakan luar negeri kedua pemimpin bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah “Bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh kedua pemimpin.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan luar negeri, terutama pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan luar negeri antara Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, serta dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa studi pustaka untuk membantu penelitian. Terdapat lima artikel jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti dan dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian adalah sebagai berikut.

Tulisan pertama adalah “*Conciliator VS Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump Dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi China*” oleh Ainun Arta Zubaidah dan Ratih Herningtyas pada tahun 2021. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan pendekatan kebijakan luar negeri antara Presiden Barack Obama dan Donald Trump terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tulisan ini juga menganalisis mengenai kepribadian Barack Obama dan Donald Trump yang mempengaruhi gaya kepemimpinan kedua pemimpin berdasarkan pemikiran K. J. Holsti. Kebijakan luar negeri Barack Obama lebih berfokus pada penggunaan soft power dan diplomasi dalam menganggapi

pertumbuhan ekonomi Tiongkok, sedangkan gaya kepemimpinan Donald Trump dikenal lebih agresif dan konfrontatif yang menyebabkan memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.¹²

Artikel jurnal kedua adalah “Analisis Perbandingan Persepsi dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol terhadap Aliansi Pertahanan Korea Selatan-Amerika Serikat Tahun 2017-2022” oleh Tasya Aryanti Santoso, Aditya Maulana Hasymi, Yoga Suharman, dan Seftina Kuswardini pada tahun 2023.¹³ Artikel jurnal ini membahas mengenai perbedaan pendekatan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Moon Jae-In dan Yoon Suk Yeol terhadap aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Pemerintahan Presiden Moon Jae In terkenal dengan pendekatan yang progresif dengan menekankan kerja sama antar-Korea. Pada masa pemerintahannya, Moon lebih mengutamakan perdamaian dan denuklirisasi dengan Korea Utara untuk menjaga stabilitas kawasan dibandingkan memperkuat aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat. Hal ini berbeda dengan Presiden Yoon Suk Yeol yang terkenal dengan pendekatan konservatif dengan menekankan penguatan aliansi militer dengan Amerika Serikat.

Artikel jurnal ini menggunakan teori persepsi politik luar negeri dari Ole R. Holsti untuk menganalisis perbandingan persepsi Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol terhadap aliansi pertahanan AS-Korea Selatan. Faktor kepentingan partai dan

¹² Ainun Arta Zubaidah dan Ratih Herningtyas, “Conciliator VS Bloc Leader: Perbandingan Kebijakan Barack Obama & Donald Trump Dalam Merespon Pertumbuhan Ekonomi China” Volume 3 Nomor 2 (2021).

¹³ Tasya Aryanti Santoso et al., “Analisis Perbandingan Persepsi Dalam Perumusan Kebijakan Luar Negeri antara Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol Terhadap Aliansi Pertahanan Korea selatan-Amerika Serikat,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2023, 27–43.

kebijakan pemimpin terdahulu yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam kebijakan luar negeri Moon Jae In dan Yoon Suk Yeol. Pemasangan THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) pada tahun 2016, di masa pemerintahan Park Geun Hye menyebabkan situasi kurang kondusif di kawasan Asia Timur yang mendapat kecaman dari berbagai pihak, yaitu masyarakat Korea Selatan, pemerintah Korea Utara, dan juga China. Hal ini yang menjadi pertimbangan Moon Jae In untuk tidak melanjutkan kerja sama THAAD. Tuntutan Trump terkait pemasangan THAAD juga menjadi salah satu penyebab kurang harmonisnya aliansi pertahanan Korea Selatan-AS. Selain itu, Moon Jae In juga menerapkan Prinsip yang dianut oleh partai pengusungnya, Demokrat. Partai Demokrat terkenal dengan prinsipnya yang mengutamakan perdamaian dan kebebasan, sehingga terlihat dalam kebijakan pemberhentian pemasangan THAAD pada masa Moon Jae In dan juga upaya perdamaian dengan Korea Utara.

Sedangkan Presiden Yoon Suk Yeol memilih untuk melanjutkan pemasangan THAAD dan memperkuat aliansi pertahanan dengan AS yang membuat hubungan militer AS-Korea Selatan berjalan sangat harmonis. Hal ini juga didukung oleh prinsip Partai Kekuatan Rakyat yang merupakan partai pengusung Yoon Suk Yeol. Partai ini dikenal sebagai partai yang konservatif dan mengutamakan kerja sama militer bilateral dan menganggap bahwa Korea Utara merupakan sistem yang tidak legal.

Studi pustaka ketiga adalah “Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan Small Theory” oleh Nadhila Harnifah, Salsa Melia Putri,

Yeni Greis Manullang, dan Zalwa Apriliana Sesa pada tahun 2021.¹⁴ Studi pustaka ini membahas mengenai perbedaan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping terkait sengketa Laut China Selatan. Dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan, Presiden Jokowi terkenal dengan sifat defensifnya. Jokowi cenderung berusaha untuk menghindari konflik dan menggunakan diplomasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan Xi Jinping terkenal dengan sifat agresifnya. Dalam sengketa Laut China Selatan, Xi Jinping berupaya untuk mendominasi kawasan dengan menggunakan *power* yang dimilikinya.

Studi pustaka ini menggunakan konsep *small theory* dari Laurent untuk menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Jokowi dan Xi Jinping dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan (LCS). Presiden Jokowi digolongkan ke dalam pemimpin yang pasif-positif dikarenakan Jokowi yang masih cenderung menyerahkan urusan strategi dari para kader partainya, selain itu Presiden Jokowi juga dianggap pasif dalam sengketa LCS karena tidak adanya tindakan agresif dalam mengklaim LCS. Namun hal inilah yang akhirnya menciptakan citra positif karena berusaha untuk meminimalisir konflik. Sedangkan Presiden Xi Jinping dianggap sebagai pemimpin yang aktif-negatif karena Xi Jinping yang secara aktif menggunakan dominasinya untuk mengklaim secara penuh LCS. Namun tindakan yang didasari ambisi ini malah mendatangkan dampak negatif bagi negara-negara yang berada di kawasan Laut China Selatan.

¹⁴ Nadhila Harnifah et al., "Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan Small Theory," *Global & Policy* 9, no. 1 (2021).

Tulisan keempat adalah “Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky dalam Menyikapi Rusia” oleh Weilan Aksendi, Maulana Rifai, dan Nurbani Adine Gustianti tahun 2024.¹⁵ Tulisan ini membahas tentang perbandingan kebijakan luar negeri Ukraina pada masa kepresidenan Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky dengan fokus pendekatan terhadap Rusia dan Barat. Kebijakan luar negeri yang digunakan Yanukovych lebih condong ke Rusia, sedangkan kebijakan luar negeri Zelensky lebih condong ke negara-negara Barat, terutama Uni Eropa dan NATO. Sikap pro-Rusia Yanukovych tersebut menyebabkan kerusuhan politik yang menuntut Yanukovych mundur sebagai Presiden, sedangkan masa kepemimpinan Zelensky yang berusaha mendekatkan diri ke Barat menyebabkan agresi militer Rusia.

Dalam tulisan ini, teori yang digunakan adalah konstruktivisme, yang menekankan pentingnya identitas. Pada masa pemerintahan Viktor Yanukovych, kebijakan yang diterapkannya seiring dengan kebijakan Rusia, sehingga Yanukovych membentuk identitas Ukraina berhubungan erat dengan Rusia. Sedangkan Volodymyr Zelensky cenderung membuat kebijakan yang pro-Barat yang membentuk identitas bahwa Ukraina adalah bagian dari negara Eropa. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada unit yang dianalisis. Tulisan ini dapat dijadikan rujukan karena membahas mengenai studi perbandingan kebijakan luar negeri.

¹⁵ Weilan Aksendi, Maulana Rifai, dan Nurbani Adine Gustianti, “Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky dalam Menyikapi Rusia,” *Journal Of Social Science Research* Vol 4 No 3 (2024).

Studi pustaka kelima adalah “Perbandingan Kebijakan Portugal dan Hongaria Terhadap Pengungsi Timur Tengah 2015-2018” oleh Fieqry Ifvan Sunardi pada tahun 2020.¹⁶ Studi pustaka ini membahas mengenai perbandingan kebijakan luar negeri antara Hongaria dan Portugal yang kontras terkait dengan para pengungsi asal Timur Tengah pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, Uni Eropa menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk menerima para pengungsi Timur Tengah yang direlokasi dari Yunani dan Italia. Namun terdapat beberapa negara yang menerima dan menolak rencana tersebut. Portugal merupakan salah satu negara yang secara terbuka dan sukarela menerima para pengungsi dari Timur Tengah yang berjumlah lebih dari 10.000 orang, bahkan jumlah ini melebihi kuota. Sedangkan Hongaria menjadi salah satu negara yang secara tegas menolak para pengungsi dari Timur Tengah, hingga membangun pagar pembatas untuk membendung arus pengungsi.

Perbandingan kebijakan Portugal dan Hongaria ini dianalisis menggunakan teori *national role conception* dari K. J. Holsti. Dalam penelitian ini dipahami bahwa Portugal dan Hongaria memiliki konsepsi peran nasional yang berbeda dalam memahami isu pengungsi asal Timur Tengah. Portugal memahami bahwa negaranya memiliki peran sebagai *defender of the faith* yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai dan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Sedangkan Hongaria memahami perannya sebagai *regional protector* yang

¹⁶ Fieqry Ifvan Sunardi, “Perbandingan Kebijakan Portugal dan Hongaria Terhadap Pengungsi Timur Tengah 2015-2018,” *Journal of International Relations* Volume 6 Nomor 1, no. of (2020): 66976, <http://www.fisip.undip.ac.id>.

bertugas untuk menjaga Eropa dari ancaman yang dapat ditimbulkan oleh para pengungsi asal Timur Tengah.

Penelitian-penelitian yang sudah dijabarkan di atas merupakan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Studi pustaka yang pertama membahas mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Barack Obama dan Donald Trump terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok, penelitian ini relevan dengan topik yang akan dianalisis membahas mengenai perbandingan kebijakan luar negeri dan negara yang ingin diteliti, yaitu Amerika Serikat. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada tokoh yang akan diteliti, yaitu Donald Trump dan Joe Biden. Sedangkan studi pustaka kedua hingga kelima relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena membahas perbandingan kebijakan luar negeri. Meskipun membahas negara dan pemimpin yang berbeda, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melihat hasil dari penelitian yang akan dilakukan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Perbandingan Kebijakan Luar Negeri

Sebelum membahas perbandingan kebijakan luar negeri, perlu dipahami pengertian kebijakan luar negeri. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian kebijakan luar negeri. *Pertama*, menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah sikap atau tindakan suatu negara yang menjadi bagian dari politik luar negeri yang berlandaskan pada pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh pembuat keputusan untuk menanggulangi masalah dan mengusahakan perubahan

dalam lingkungan internasional.¹⁷ *Kedua*, menurut Ryan Beasley, kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai segala tindakan dan perilaku yang diambil oleh suatu negara dalam menjalani hubungan dengan semua pihak di luar teritorinya, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara.¹⁸ *Terakhir*, menurut Morin dan Paquin, kebijakan luar negeri mengacu pada strategi atau tindakan yang digunakan negara berdaulat untuk mengelola hubungannya dengan negara lain dan entitas internasional.¹⁹

Dalam melakukan perbandingan kebijakan luar negeri, penting untuk memahami pengertian dari perbandingan kebijakan luar negeri itu sendiri. Terdapat beberapa pendapat mengenai makna dari perbandingan kebijakan luar negeri. Menurut Marijke Breuning, perbandingan kebijakan luar negeri adalah pendekatan analitis yang digunakan untuk meneliti dan membedakan kebijakan luar negeri dari berbagai negara atau satu negara dalam periode waktu yang berbeda.²⁰ Sedangkan menurut Ryan Beasley, perbandingan kebijakan luar negeri merupakan studi yang menganalisis dan membandingkan kebijakan luar negeri negara atau pemimpin yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam perilaku internasional.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan kebijakan luar negeri merupakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan persamaan dan perbedaan kebijakan luar negeri

¹⁷ Debbie Affianty, *Analisa Politik Luar Negeri* (Malang: UIN Press, 2015).

¹⁸ Ryan K Beasley et al., *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior Second Edition* (Los Angeles: SAGE Publications, 2013).

¹⁹ Jean-Frédéric Morin dan Jonathan Paquin, *Foreign Policy Analysis: A Toolbox* (Canada: Palgrave Macmillan, 2018).

²⁰ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (Palgrave Macmillan, 2007), <https://doi.org/10.1057/9780230609242>.

²¹ Beasley et al., *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior Second Edition*.

dari negara yang berbeda atau satu negara pada periode waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi perilaku negara kedepannya. Perbandingan kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk memahami dinamika hubungan internasional, mengidentifikasi pola dan perilaku negara, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi tindakan negara di masa depan.

Dalam penelitian ini, konsep yang akan digunakan adalah konsep perbandingan kebijakan luar negeri dari Ryan K. Beasley. Adapun aspek yang harus diperhatikan dalam analisis perbandingan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berfokus pada aspek dalam sistem internasional yang mendorong suatu negara pada arah kebijakan luar negeri tertentu. Terdapat beberapa perspektif dalam memahami faktor eksternal dalam kebijakan luar negeri. Realisme mengusulkan bahwa dalam sistem internasional, negara termotivasi untuk mencari kekuatan dan menambah kekuasaan karena negara yang kuat akan dapat mengatur negara yang lemah. Sedangkan liberalisme beranggapan bahwa adanya sikap saling ketergantungan antar-negara yang menghasilkan kebijakan yang kooperatif, dalam hal ini negara akan lebih mengutamakan negosiasi dan kerja sama. Dan konstruktivisme berpendapat bahwa dalam sistem internasional dapat norma internasional yang akan mengatur perilaku negara.

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam perbandingan kebijakan luar negeri dapat berupa lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, opini publik, dan pemimpin. Lembaga pemerintah memainkan peran dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri

dengan adanya perbedaan antara sistem demokrasi dan otoriter. Dimana dalam sistem demokrasi, keputusan kebijakan luar negeri tersebar di seluruh lembaga demokrasi sehingga banyak aktor yang terlibat, sedangkan dalam sistem otoriter, seorang pemimpin cenderung membuat keputusan sendiri. Kelompok masyarakat berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri dengan menghubungkan masyarakat dengan negara. Dalam kebijakan luar negeri, opini publik berperan untuk menentang atau mendukung suatu rancangan kebijakan luar negeri. Dan pemimpin memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri karena memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya dan merumuskan kebijakan luar negeri. Kepribadian, keyakinan, dan pengalaman politik akan turut dalam membentuk arah kebijakannya. Arah kebijakan luar negeri juga akan dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin yang cenderung konfrontatif atau kolaboratif.

Hasil dari penelitian mengenai perbandingan kebijakan luar negeri ini adalah ditemukannya persamaan dan perbedaan dari kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor kebijakan luar negeri sangat berperan dalam membentuk arah kebijakan luar negeri seorang pemimpin. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang sama mungkin saja dapat menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda tergantung dengan bagaimana seorang pemimpin menanggapi faktor kebijakan luar negeri tersebut.

Pada penelitian ini, digunakan konsep perbandingan kebijakan luar negeri dari Beasley untuk membandingkan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi AS dengan Tiongkok. Penggunaan konsep perbandingan kebijakan luar negeri ini dianggap relevan karena pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri dari dua pemimpin

dari periode kepemimpinan yang berbeda dalam satu negara, yaitu Amerika Serikat. Perbandingan kebijakan luar negeri ini dapat digunakan untuk memahami hubungan ekonomi AS-Tiongkok pada era Donald Trump dan Joe Biden dan menentukan persamaan dan perbedaan kebijakan luar negeri yang ditetapkan kedua pemimpin.

1.7.2 Teori Peran

Menurut K. J. Holsti, peran merupakan definisi yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, serta fungsi negara terhadap suatu masalah internasional.²² Peran menunjukkan bagaimana sikap negara terhadap lingkungan internasional. Peran diperlukan untuk menentukan sikap dan posisi suatu negara dalam interaksinya di sistem internasional.

Teori peran bertujuan untuk memahami peran apa yang akan dimainkan oleh negara dalam sistem internasional. Peran yang diciptakan oleh suatu negara akan berpengaruh terhadap perilaku dalam sistem internasional, sehingga kebijakan luar negeri digunakan untuk memainkan peran di sistem internasional. Negara atau pemimpin akan mengambil peran yang sesuai dengan keinginan domestik dan peran negara dapat di pandang berbeda, apabila suatu aktor melihat sistem internasional yang pandangan yang berbeda.

Terdapat 16 tipe peran nasional yang dikemukakan Holsti yang merupakan komponen dari kebijakan luar negeri, yaitu:

²² KJ Holsti (terj), *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Binacipta, 1992).

1. *Bastion of the revolution, liberator*

Beberapa pemerintah merasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin atau mengorganisasikan gerakan revolusi di luar negeri.

2. *Regional leader*

Peran ini merujuk pada tugas dan tanggung jawab khusus yang didasari oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain di kawasan yang sama.

3. *Regional protector*

Walaupun peran ini terlihat mengimplikasikan tanggung jawab kepemimpinan tertentu dalam suatu kawasan, peran ini menekankan pentingnya pemberian perlindungan bagi kawasan sekitar.

4. *Active independent*

Peran ini menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan dalam hubungan diplomatik dengan negara lain sebanyak mungkin dan biasanya bertindak sebagai penengah dalam konflik antar blok.

5. *Liberation supporter*

Berbeda dengan peran *bastion of the revolution*, peran ini tidak mengindikasikan tanggung jawab formal untuk memimpin, mengorganisasi, dan mendukung secara fisik gerakan kemerdekaan di luar negeri.

6. *Anti-imperialist agent*

Dimana impererialisme dianggap sebagai ancaman serius, sehingga negara memandang dirinya sebagai agen dalam perjuangan melawan imperialisme.

7. *Defender of the faith*

Beberapa pemerintah memandang kebijakan luar negerinya dalam term nilai-nilai pelindung (tapi tidak dalam batas wilayah tertentu) dari serangan.

8. *Mediator-integrator*

Beberapa pemerintahan kontemporer memandang dirinya mampu untuk bertanggung jawab untuk memenuhi atau menjalankan tugas sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah di negara lain. Mereka menganggap dirinya sebagai penyelesai masalah di kawasan regional maupun global.

9. *Regional-subsystem collaboration*

Peran ini berbeda dengan mediator-integrator karena peran ini tidak menghadapi konflik yang sama. Peran ini mengindikasikan komitmen yang lebih jauh terhadap kerja sama dengan negara lain untuk membangun masyarakat luas yang bersatu, bekerja sama, dan berintegrasi dengan unit politik lainnya.

10. *Developer*

Peran ini mengindikasikan tugas atau kewajiban tertentu untuk membantu negara-negara berkembang.

11. *Bridge*

Peran ini biasanya muncul dalam bentuk unik dan nampaknya tidak menstimulir tindakan tertentu.

12. *Faithful ally*

Yang dimaksud *faithful ally* ialah, bila pembuat kebijakan suatu negara menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu (*fraternal ally*) mereka dengan segala cara. Mereka tidak terlalu mengharapkan bantuan dari luar seperti yang mereka berikan pada pihak lain.

13. *Independent*

Peran dijalankan oleh sebagian besar pemimpin negara di dunia. Mereka menyatakan dalam keadaan apapun, pemerintah akan mengejar kepentingan negara, jika tidak mereka tidak akan bertindak atau menjalankan fungsi apapun dalam sistem internasional.

14. *Example*

Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mempunyai pengaruh dalam sistem internasional dengan cara menjalankan kebijakan dalam negeri tertentu.

15. *Internal development*

Peran ini tidak merujuk pada tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional tetapi pada kesadaran bahwa kepentingan negara adalah membangun negaranya sendiri. Peran ini menyiratkan rendahnya partisipasi dalam politik internasional.

16. *Other role*

Peran ini mengimplikasikan adanya sumber-sumber lain yang melatarbelakangi tindakan suatu negara dalam politik luar negerinya selain yang telah disebutkan.

Analisis peran dapat dilakukan dengan memahami bagaimana negara mengambil perannya masing-masing dalam interaksi internasional. Negara-negara akan diklasifikasikan berdasarkan peran yang dimainkan dalam sistem internasional. Teori peran dapat digunakan dengan menganalisis konteks domestik yang akan mempengaruhi peran negara dalam sistem internasional. Teori peran dapat diterapkan dengan memahami bagaimana negara atau aktor memandang sistem internasional.

1.8 Metodologi Penelitian

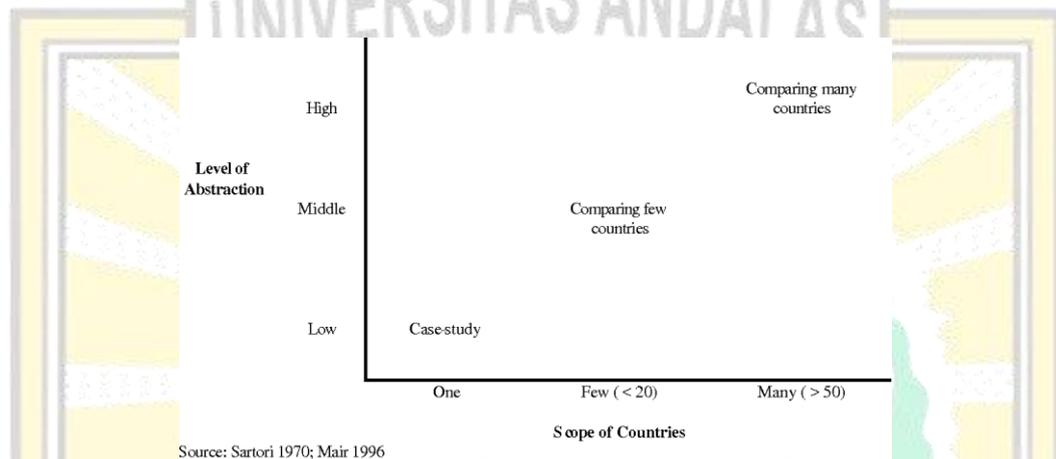
1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menjelaskan persamaan dan perbedaan dari suatu kajian.²³ Penelitian komparatif bertujuan untuk membuat perbandingan lintas negara. Selain itu, penelitian komparatif juga bertujuan untuk mengidentifikasi arah kebijakan luar negeri suatu negara kedepannya. Penelitian komparatif penting untuk dilakukan karena dapat membantu memprediksi konflik yang dapat terjadi di masa depan, sehingga negara-negara dapat mengantisipasi konflik. Dalam penelitian komparatif, aspek yang dapat diteliti adalah negara, masyarakat, dan bahkan peradaban.

Menurut Landmann, metode komparatif mengacu pada pendekatan sistematis untuk membandingkan entitas politik, seperti negara, wilayah, ataupun sistem

²³ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

politik, untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam perilaku dan hasil politik.²⁴ Metode komparatif terbagi dalam tiga pendekatan utama, yaitu *many countries*, *few countries*, dan *single country*. Secara singkat, ketiga metode tersebut dapat dipahami melalui gambar di bawah ini:



Gambar 1. 1 Metode Perbandingan Politik

Sumber: Todd Landman. *Issues and Method in Comparative Politics: An Introduction (Third edition)*. London. Routledge. 2008. Hlm 26

Metode *single country* berfokus pada analisis satu negara untuk memahami dinamika politik, institusi, dan perilaku negara secara lebih spesifik dan mendalam. Metode *few countries* digunakan untuk membandingkan sejumlah negara dalam memahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda namun masih memiliki persamaan tertentu, seperti sistem politik. Dan metode *many countries* merupakan perbandingan banyak negara untuk memahami pola, hubungan, dan generalisasi dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial.

²⁴ Todd Landman, *Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, Third Edition*, 2008.

Level of abstraction menggambarkan seberapa general perilaku negara dalam suatu isu. Perbandingan banyak negara memiliki tingkat abstraksi tinggi karena digunakan untuk memahami faktor universal yang mempengaruhi arah politik negara. Sedangkan perbandingan beberapa negara dan satu negara memiliki tingkat abstraksi yang lebih rendah karena semakin spesifik pemahaman mengenai perilaku negara, khususnya perbandingan satu negara.

Berdasarkan penjabaran metode-metode tersebut, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode *single country* untuk menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Metode komparatif *single country* dapat digunakan untuk membandingkan satu periode pemimpin politik dengan periode lainnya.²⁵ Metode komparatif ini dapat membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kebijakan luar negeri dua pemimpin Amerika Serikat terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok.

1.8.2 Batasan Penelitian

Di dalam suatu penelitian dibutuhkan batasan-batasan penelitian untuk lebih memahami tujuan dari penelitian yang dilakukan. Batasan dalam penelitian ini adalah dua periode presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump dan Joe Biden. Tahun 2017-2021 merupakan masa kepemimpinan Presiden Donald Trump pada periode pertama. Dan masa kepemimpinan Presiden Joe Biden, yaitu tahun 2021-2025. Selain itu, fokus kajian dari penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Amerika terhadap hubungan ekonomi dengan Tiongkok.

²⁵ Landman.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Menurut Mohtar Mas'oeed, unit analisis mengacu pada objek yang akan dideskripsikan, jelaskan, dan ramalkan, atau disebut juga variabel dependen.²⁶ Sedangkan unit eksplanasi mengacu pada unit yang mempengaruhi unit analisis, atau disebut juga variabel independen.²⁷ Selanjutnya, tingkat analisis merujuk pada kedudukan atau posisi dari unit analisis, baik itu individu, kelompok, organisasi, negara, maupun sistem internasional. Tingkat analisis ini berperan untuk membantu peneliti dalam menggambarkan ruang lingkup yang akan diteliti dan dianalisis secara terperinci.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden. Sementara unit eksplanasi yang akan diperhitungkan, yaitu hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa Donald Trump dan Joe Biden. Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada tingkat negara, karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi. Pengumpulan data sangat penting dalam melakukan perbandingan kebijakan luar negeri, karena dapat membantu memberikan informasi untuk menganalisis dan

²⁶ Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, 1 ed. (Jakarta: LP3ES, 1990).

²⁷ Mas'oeed.

memahami perilaku negara. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah, data ini dapat berupa jurnal, dokumen, buku, e-book, berita, maupun karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari jurnal, buku, serta berita yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Dengan kata kunci yang digunakan, yaitu Amerika, Donald Trump, Joe Biden, Tiongkok, dan ekonomi. Peneliti akan mengumpulkan data mengenai biografi Trump dan Biden, hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok pada era Trump dan Biden, dan kebijakan luar negeri Trump dan Biden terhadap Tiongkok.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis sekunder data kualitatif. Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berbeda dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli.²⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, berita, dan buku yang berkaitan dengan biografi Trump dan Biden, hubungan ekonomi Amerika dan China, dan kebijakan luar negeri Trump dan Biden.

Pada penelitian ini, akan digunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Terdapat tiga tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu:²⁹

²⁸ Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*.

²⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Soldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Third Edition (Los Angeles: SAGE, 2014).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis. Pada proses ini, peneliti akan memilih data yang berkaitan dengan hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden, serta kebijakan luar negeri Trump dan Biden terhadap hubungan Amerika dan Tiongkok.

2. Penyajian Data

Secara umum, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian akan disajikan data mengenai hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden, kebijakan luar negeri kedua presiden terhadap hubungan ekonomi Amerika dan Tiongkok. Dan selanjutnya akan disajikan data mengenai analisis perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil dari perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kebijakan luar negeri dalam pelaksanaan hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang dari penelitian, membahas rumusan masalah, merincikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, menguraikan studi pustaka, kerangka pemikiran yang akan digunakan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Hubungan Ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok pada Era Donald Trump dan Joe Biden

Bab ini akan menjelaskan sejarah hubungan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok, serta hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok pada era Presiden Donald Trump dan Joe Biden. Bab ini juga akan membahas mengenai dampak dari hubungan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara.

BAB III Kebijakan Luar Negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang Hubungan Ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok

Bab ini akan menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang hubungan ekonomi Tiongkok pada era Presiden Donald Trump dan Joe Biden. Bab ini dapat berisikan kebijakan-kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Trump dan Biden terhadap Tiongkok. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai peran parlemen Amerika Serikat, opini publik, dan kelompok masyarakat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

BAB IV Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Donald Trump dan Joe Biden tentang Hubungan Ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok

Bab ini akan berisikan analisis peneliti mengenai perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dalam bab ini, peneliti juga akan mengaplikasikan teori perbandingan kebijakan luar negeri dan teori peran untuk menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri Donald Trump dan Joe Biden terhadap hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan Tiongkok.

BAB V Penutup

Pada bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang ditemukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan ini memuat inti pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang menjadi dasar temuan dari penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti juga akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya guna mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

